

# LAPORAN KINERJA 2020



**KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PALU**  
KANWIL DJKN SULAWESI UTARA, TENGAH, GORONTALO DAN MALUKU UTARA  
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA  
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) merupakan unit eselon I Kementerian Keuangan yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara, dan lelang sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No.170/PMK.01/2012 tanggal 06 November 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, DJKN memiliki instansi vertikal yang terdiri dari 17 (tujuh belas) Kantor Wilayah dan 71 (tujuh puluh satu) Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang / KPKNL. Salah satu kantor operasional DJKN yang beroperasi di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah adalah KPKNL Palu yang berkedudukan di Kota Palu dengan wilayah kerja meliputi 13 kota/kabupaten yaitu:

1. Kota Palu,
2. Kabupaten Banggai,
3. Kabupaten Banggai Kepulauan,
4. Kabupaten Banggai Laut,
5. Kabupaten Buol,
6. Kabupaten Donggala,
7. Kabupaten Morowali,
8. Kabupaten Morowali Utara,
9. Kabupaten Parigi Moutong,
10. Kabupaten Poso,
11. Kabupaten Sigi,
12. Kabupaten Tojo Una-Una dan
13. Kabupaten Toli-Toli.

KPKNL Palu merupakan salah satu instansi vertikal DJKN yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah DJKN Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara, bertempat di Manado.

KPKNL Palu mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang. Dalam melaksanakan tugas, KPKNL Palu menyelenggarakan fungsi meliputi:

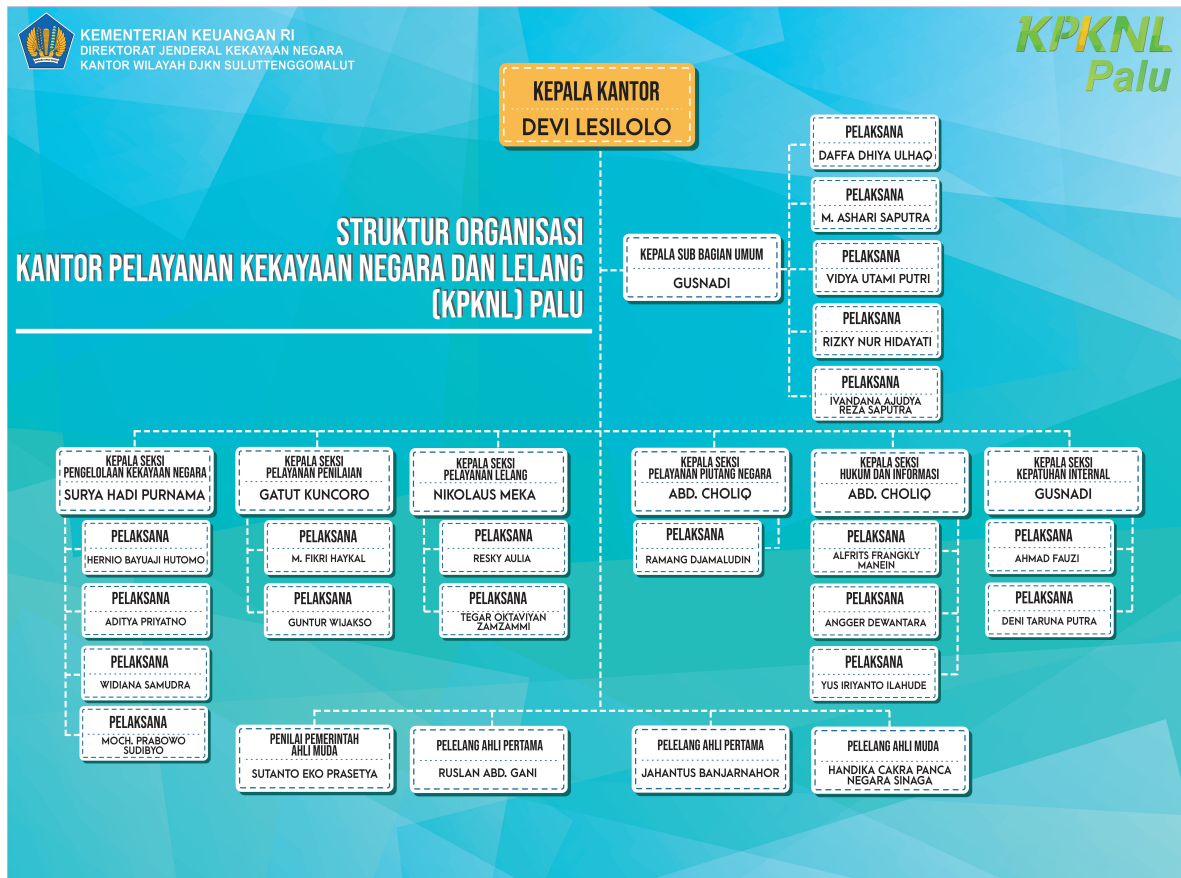
1. Inventarisasi, pengadministrasian, pendayagunaan, pengamanan kekayaan negara;
2. Registrasi, verifikasi dan analisa pertimbangan permohonan pengalihan serta penghapusan kekayaan negara;
3. Registrasi penerimaan berkas, penetapan, penagihan, pengelolaan barang jaminan, eksekusi, pemeriksaan harta kekayaan milik penanggung utang/penjamin utang;
4. Penyiapan bahan pertimbangan atas permohonan keringanan jangka waktu dan/atau jumlah utang, usul pencegahan dan penyanderaan penanggung utang dan/atau penjamin utang, serta penyiapan data usul penghapusan piutang negara;
5. Pelaksanaan pelayanan penilaian;
6. Pelaksanaan pelayanan lelang;
7. Penyajian informasi di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang;
8. Pelaksanaan penetapan dan penagihan piutang negara serta pemeriksaan kemampuan penanggung utang atau penjamin utang dan eksekusi barang jaminan;
9. Pelaksanaan pemeriksaan barang jaminan milik penanggung utang atau penjamin utang serta harta kekayaan lain;
10. Pelaksanaan bimbingan kepada Pejabat Lelang;
11. Inventarisasi, pengamanan dan pendayagunaan barang jaminan;
12. Pelaksanaan pemberian pertimbangan dan bantuan hukum pengurusan piutang negara dan lelang;

13. Verifikasi dan pembukuan penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang; dan

14. Pelaksanaan administrasi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang.

Adapun susunan organisasi KPKNL Palu terdiri dari :

- a. Subbagian Umum;
- b. Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara;
- c. Seksi Pelayanan Penilaian;
- d. Seksi Piutang Negara;
- e. Seksi Pelayanan Lelang;
- f. Seksi Hukum dan Informasi;
- g. Seksi Kepatuhan Internal; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.



Dalam menjalankan tugasnya, KPKNL Palu pada saat ini didukung oleh 29 orang pegawai dari berbagai bidang keahlian seperti ekonomi, keuangan, bisnis, hukum, sosial, dan keahlian lainnya.

### **A. Peran Strategis**

KPKNL Palu sebagai instansi vertikal DJKN melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara optimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan, visi dan misi organisasi sehingga tercapai pengelolaan kekayaan negara, piutang negara dan lelang yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab. KPKNL Palu mempunyai peran/aspek strategis antara lain:

a. Subbagian Umum yang merupakan bagian penunjang tugas dan fungsi KPKNL dan mempunyai tugas di bidang kepegawaian diantaranya:

- menyusun Daftar Urut Kependidikan (DUK) dan formasi pegawai;
- melaksanakan administrasi kepegawaian seperti DP3, laporan LP2P, dan KP4;
- mengusulkan pegawai untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan;
- mengurus permintaan Kartu Taspen, Karpeg, Askes; dan
- menyusun laporan absensi bulan kantor.

Sedangkan di bidang keuangan Subbagian Umum mempunyai tugas:

- menyusun Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) berdasarkan dana yang tersedia dalam DIPA dan
- menyelenggarakan pembayaran gaji/TKPN dan/atau penghasilan lainnya.

Pada bagian Penatausahaan BMN/Inventaris Kantor serta Pengadaan Barang dan Jasa tugas Subbagian umum adalah:

- menyelenggarakan inventarisasi BMN pada kantor pelayanan;
- menyelenggarakan pemenuhan kebutuhan barang/jasa keperluan kantor;
- menyelenggarakan penyimpanan dan pendistribusian barang keperluan kantor; dan
- menyusun konsep rencana penghapusan barang inventaris kantor.

Subbagian Umum juga mempunyai tugas dalam bidang Layanan Umum dan Laporan seperti :

- menyelenggarakan urusan surat masuk dan keluar, dan pengadaan;
  - menyelenggarakan penyusutan arsip yang telah memenuhi jadwal retensi arsip;
  - melakukan pemasangan iklan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - menyelenggarakan kebersihan, keamanan dan upacara bendera;
  - menyusun bahan masukan konsep rencana strategi, Rencana Kerja, Rencana Kerja Tahunan dan Rencana Kerja Anggaran Tahunan; dan melaksanakan pembinaan kepada para pelaksana.
- b. Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara, KPKNL Palu memiliki peran strategis untuk mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara yang bertujuan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna kekayaan negara. Peningkatan daya guna dan hasil guna terutama difokuskan pada kegiatan utilisasi BMN, pengukuran kinerja BMN, pengamanan BMN, dan penatausahaan BMN. Untuk tahun 2020, fokus pengelolaan kekayaan negara ditujukan pada utilisasi BMN, evaluasi kinerja BMN, dan penilaian kembali (revaluasi) dengan tujuan utama adalah (i) pemanfaatan, (ii) penetapan status BMN, (iii) pemindahtanganan, (iv) penatausahaan, dan (v) penghapusan, serta sertifikasi terhadap 62 objek bidang tanah.
- c. Seksi Pelayanan Penilaian, KPKNL Palu memiliki peran strategis dalam melakukan penilaian BMN dan barang jaminan piutang negara dengan tujuan untuk menentukan Nilai Wajar dan Nilai Likuidasi. Dalam setiap tahapan pengelolaan BMN khususnya penghapusan BMN, penilaian mempunyai peranan dalam menyediakan informasi nilai wajar aset dan analisis penggunaan tertinggi dan terbaik (*the Highest and Best Use* atau HBU). Untuk tahun 2020, Seksi Pelayanan Penilaian fokus pada pelaksanaan perbaikan penilaian kembali Barang Milik Negara (*Revaluasi* BMN) tahun 2017-2018 yang merupakan target nasional Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) karena BMN di masa sekarang tidak lagi mencerminkan nilai yang sesungguhnya. Selain itu KPKNL Palu juga membantu pelaksanaan penilaian Barang Milik Daerah (BMD), untuk menentukan nilai wajar dalam rangka pemindahtanganan BMD;

- d. Seksi Pelayanan Pengurusan Piutang Negara, KPKNL Palu memiliki peran strategis dalam rangka menyelamatkan keuangan negara. Adapun proses tersebut dilaksanakan dengan melakukan penegakan hukum dalam penyelesaian pengurusan piutang Negara/daerah baik kepada Kementerian/Lembaga maupun Pemerintah Daerah. Dalam memberikan pelayanan pengurusan piutang Negara, KPKNL Palu berkontribusi dalam pemasukan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) berupa biaya administrasi (biad) Pengurusan Piutang Negara;
- e. Seksi Pelayanan Lelang, KPKNL Palu memiliki peran strategis dalam memberikan layanan lelang yang bertujuan untuk menyediakan sarana transaksi penjualan aset secara adil dan transparan. KPKNL Palu juga terus berupaya menjadikan lelang sebagai salah satu sarana jual beli yang diminati oleh masyarakat (*sales means auction*) dengan melakukan penggalan potensi lelang dan menyebarluaskan cara penjualan lelang kepada masyarakat luas. Selain itu, lelang merupakan pelaksanaan suatu putusan/penetapan pengadilan maupun Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN). Dalam pelaksanaan lelang terdapat beberapa keuntungan dibandingkan dengan transaksi jual beli biasa, yaitu lebih transparan, akuntabel, kompetitif, efisien, dan lebih menjamin kepastian hukum dengan adanya produk hukum risalah lelang yang merupakan akta otentik. Risalah Lelang berfungsi sebagai akta *van transport* untuk kepentingan peralihan hak. Dalam memberikan pelayanan lelang, KPKNL Palu berkontribusi dalam pemasukan PNBP berupa bea lelang. Saat ini KPKNL Palu juga sudah mengimplementasikan Lelang Internet (*e-auction*) yang memiliki banyak keunggulan, diantaranya: lelang menjadi lebih mudah, dapat diakses di manapun dan kapanpun, lebih efisien karena tidak membutuhkan biaya transportasi dan akomodasi bagi para pesertanya, penawaran lebih cepat dilakukan karena penawaran lelang dapat dilakukan begitu pengumuman lelang sudah diunggah di situs lelang DJKN ([www.lelang.go.id](http://www.lelang.go.id)) dan penawaran langsung diterima dalam hitungan detik, dan yang penting juga *e-auction* ini telah memberikan kontribusi hasil lelang yang lebih optimal dibandingkan dengan lelang konvensional;

- f. Seksi Hukum dan Informasi, memiliki peran melakukan penanganan perkara, pengelolaan dan pemeliharaan perangkat, jaringan, infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, penyajian informasi dan hubungan kemasyarakatan, implementasi sistem aplikasi, penyiapan bahan penyusunan rencana strategik, laporan akuntabilitas, dan laporan tahunan, penatausahaan berkas kasus piutang negara, serta verifikasi penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang.
- g. Seksi Kepatuhan Internal, berperan dalam melakukan pemantauan pengendalian intern, pengelolaan kinerja, pengelolaan risiko, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, serta perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional, mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jabatan fungsional di KPKNL Palu sesuai SK terdiri dari Pejabat Fungsional peladang dan Penilai, sedangkan Pejabat Juru Sita, Pemeriksa belum menjadi Pejabat Fungsional.

Dalam menjalankan tugasnya, KPKNL Palu saat ini didukung oleh 29 orang pegawai. Komposisi pegawai KPKNL Palu berdasarkan golongan, gender, dan tingkat pendidikan, dan umur adalah sebagai berikut:

**TABEL 1**  
**Komposisi Pegawai Berdasarkan Unit Kerja, Eselonisasi, dan Golongan**

Unit Kerja	Jumlah Pegawai	Eselon					Golongan			
		II	III	IV	JF	Non	IV	III	II	I
Kepala Kantor	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0
Subbagian Umum	5	0	0	0	0	5	0	0	5	0
Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara	5	0	0	1	0	4	0	4	1	0
Seksi Pelayanan Penilaian	4	0	0	1	1	2	0	2	2	0
Seksi Piutang Negara	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0
Seksi Pelayanan Lelang	6	0	0	1	3	2	0	6	0	0
Seksi Hukum dan Informasi	4	0	0	1	0	3	0	3	1	0
Seksi Kepatuhan Internal	3	0	0	1	0	2	0	1	2	0
<b>Jumlah</b>	<b>29</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>19</b>	<b>1</b>	<b>17</b>	<b>11</b>	<b>0</b>

**TABEL 2**  
**Komposisi Pegawai Berdasarkan Gender**

GENDER	GOLONGAN RUANG				JUMLAH
	I	II	III	IV	
Perempuan	0	2	0	0	2
Laki-Laki	0	9	17	1	27
<b>JUMLAH</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>17</b>	<b>1</b>	<b>29</b>

**TABEL 3**  
**Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan dan Golongan**

TINGKAT PENDIDIKAN	GOLONGAN RUANG				JUMLAH
	I	II	III	IV	
SD	0	0	0	0	0
SLTP	0	0	0	0	0
SLTA	0	0	0	0	0
D1	0	1	0	0	1
DIII	0	10	0	0	10
D4/S1	0	0	13	1	14
S2	0	0	4	0	4
<b>JUMLAH</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>17</b>	<b>1</b>	<b>29</b>

**TABEL 4**  
**Komposisi Pegawai Berdasarkan Umur dan Golongan**

KELOMPOK UMUR	GOLONGAN RUANG				JUMLAH
	I	II	III	IV	
18-30	0	10	5	0	15
31-40	0	1	1	0	2
41-50	0	0	11	0	11
Diatas 50	0	0	0	1	1
<b>JUMLAH</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>17</b>	<b>1</b>	<b>29</b>

**TABEL 5**

### Tenaga Fungsional KPKNL Palu

No.	JABATAN FUNGSIONAL	JUMLAH	SK Jafung
1	Juru Sita	2	Belum Jafung
2	Pejabat Lelang	3	Sudah
3	Penilai	1	Sudah
4	Pemeriksa	3	Belum Jafung

#### B. Isu Strategis

Adapun Isu strategis terkait dengan tugas dan fungsi pada KPKNL Palu dapat dijelaskan sebagai berikut.

a. Isu strategis pada Seksi PKN adalah:

- berkoordinasi dengan satker K/L di wilayah Sulawesi Tengah dalam pelaksanaan optimalisasi pengelolaan kekayaan negara seperti pengelolaan BMN dan pemanfaatan BMN;
- memberikan bimbingan teknis kepada satker K/L di wilayah Sulawesi Tengah dalam pelaksanaan rekonsiliasi BMN dengan menggunakan aplikasi SIMAN secara daring;
- memberikan *reward* dan *punishment* kepada satker K/L di wilayah Sulteng terhadap kepatuhan pelaksanaan rekonsiliasi pada KPKNL Palu;
- pada tahun 2020 masih berkonsentrasi penyelesaian atas perbaikan penilaian kembali Barang Milik Negara tahun 2017-2018 sebagai tindak lanjut rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);
- upaya pencapaian manfaat ekonomi Barang Milik Negara dalam bentuk penerimaan Negara bukan pajak dan penghematan biaya (*cost saving*); dan ;
- membantu dan mengkoordinasikan pensertifikatan BMN pada satker di wilayah Sulteng sebanyak 62 bidang tanah.
- melaksanakan evaluasi kinerja BMN dan pengukuran kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK.

b. Isu strategis pada Seksi Piutang adalah:

- perlunya segera dilakukan sosialisasi serta upaya penegakan hukum Pengurusan Piutang Negara/Daerah kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah mengingat masih ada SKPD yang belum memahami/mengerti alur Pengurusan Piutang Negara/Daerah dan ;
- target penyelesaian atas piutang yang tinggi dibandingkan potensi piutang yang dapat tertagih.

c. Isu strategis pada Seksi Lelang adalah:

- mendukung terwujudnya kelancaran pelayanan lelang sebagai salah satu penerimaan PNB. Untuk itu perlu mengoptimalkan kinerja para pejabat lelang dan pejabat fungsional pelelang dengan memberikan penyegaran bagi para pejabat lelang dan pejabat fungsional pelelang, memberdayakan Balai Lelang, dan memaksimalkan penggunaan aplikasi penunjang lelang (*e-Auction*);
- mewujudkan keikutsertaan masyarakat luas untuk menggunakan lelang sebagai salah satu sarana jual/beli yang aman, mudah transparan dan mendapat perlindungan hukum yang pasti dan ;
- mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara/daerah yang lebih baik khususnya pemindahtanganan BMN dan/atau BMD.

d. Isu strategis pada Seksi Penilaian adalah:

- berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah maka seksi penilaian melakukan perbaikan penilaian kembali Barang Milik Negara (Revaluasi BMN) pada Tahun 2017 – 2018. Dimana target revaluasi BMN KPKNL Palu pada tahun 2020 sebanyak 8.071 aset berupa tanah dan bangunan yang dimiliki satker di wilayah Sulawesi Tengah.

- adanya kepercayaan Aparat Pemeriksa Fungsional pada Pemerintah Daerah yang mempercayakan penilaian BMD dilakukan oleh Penilai KPKNL Palu, sehingga beberapa Pemerintah Daerah di Provinsi Sulawesi Tengah telah mengajukan permohonan penilaian BMD dalam rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, pemindahtanganan dan pemanfaatan BMD. KPKNL Palu dalam melaksanakan penilaian BMD, tetap mengedepankan asas profesionalisme dengan mengutamakan tugas dan fungsi penilaian. Dalam kurun waktu 2020 KPKNL Palu telah menyelesaikan permohonan penilaian BMD dengan menerbitkan 274 Laporan Penilaian dengan tujuan penilaian adalah penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah, pemindahtanganan dan pemanfaatan BMD;
- dengan telah diterbitkannya ketentuan-ketentuan baru mengenai Penilaian, perlu dilakukan sosialisasi kepada pemangku kepentingan sehingga pemohon penilaian dapat memahami prosedur dan ketentuan-ketentuan dalam permohonan penilaian. Dalam kurun waktu 2020 KPKNL Palu telah melakukan kegiatan sosialisasi penilaian kepada Satuan Kerja di Wilayah Sulawesi Tengah; dan
- kegiatan pembinaan penilai tetap perlu dilaksanakan agar penilai dapat melaksanakan tugasnya dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kegiatan dimaksud dilaksanakan melalui kegiatan *in-house training*, diskusi, dan *peer review*.

e. Isu strategis pada Subbagian Umum adalah:

- berperan aktif dalam menyediakan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia yang memadai dalam rangka mendukung layanan unggulannya KPKNL Palu.
- gedung kantor KPKNL Palu telah selesai direhabilitasi pasca gempa tahun 2018, saat ini lay out kantor menjadi *openspace* dan semua kegiatan pegawai dipusatkan di lantai 1. Adapun lantai 2 merupakan

area ruang rapat, ruang serbaguna, *pantry*, musholla, gudang, serta ruangan laktasi.

- Seiring dengan diterapkannya penggunaan tata naskah dinas secara elektronik pada aplikasi Nadine, diharapkan korepondensi akan berlangsung lebih cepat, akuntabel dan lebih hemat karena paperless.

f. Isu strategis pada Seksi Hukum dan Informasi adalah:

- mewujudkan kelancaran penanganan/penyelesaian kasus perkara gugatan di pengadilan, penyajian informasi/kehumasan, penatausahaan berkas kasus piutang negara, serta verifikasi penerimaan pembayaran piutang negara yang efektif;
- mewujudkan pengelolaan data dan penyajian informasi di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara, dan lelang yang cepat dan akurat, pengawasan sistem aplikasi yang terkendali serta pengelolaan jaringan komunikasi data yang baik sehingga informasi tersaji sesuai kebutuhan dan;
- melaksanakan proses penerimaan hasil pengurusan piutang dan lelang serta penerimaan negara lainnya secara efisien, efektif dan dapat dipertanggungjawabkan.

### C. Tantangan/Hambatan

a. Luasnya Wilayah kerja.

Luas provinsi Sulteng adalah ± 67.000 Km<sup>2</sup> yang terdiri dari 1 Kota dan 12 Kabupaten. KPKNL Palu juga melayani 646 satuan kerja (satker) Kementerian/Lembaga, perbankan, kejaksanaan, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota yang tersebar di seluruh Provinsi Sulawesi Tengah sehingga koordinasi dengan pihak-pihak tersebut memerlukan biaya yang cukup besar dan waktu yang lama, sedang biaya dan SDM yang tersedia terbatas.

- b. Terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM).  
Dengan beban kerja sebagaimana disebutkan pada poin a di atas dan cakupan wilayah yang luas, saat ini KPKNL Palu didukung oleh 29 pegawai, Pegawai tersebut terdiri dari:
- 1 Pejabat struktural eselon III (Kepala Kantor);
  - 5 Pejabat struktural eselon IV (Kepala Seksi/Kepala Subbagian), 4 Pejabat Fungsional dan;
  - 19 Pelaksana.
- c. Kurangnya tingkat kepatuhan dan kesadaran satker dalam pengelolaan BMN karena kurangnya dukungan peraturan yang ada dalam pelaksanaan tugas dan fungsi KPKNL Palu.
- d. Penerapan tata naskah dinas secara elektronik pada aplikasi Nadine serta rencana pelaksanaan *Join Domain* pada instansi KemenKeu menjadi tantangan tersendiri bagi pegawai untuk segera beradaptasi dan merubah pola kerja atau kebiasaan lama.
- e. Belum memadainya infrastruktur dan fasilitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi KPKNL Palu seperti jaringan internet yang lambat dan komputer pengolah data yang terbatas.
- f. Besarnya Piutang Daerah yang belum diurus sesuai ketentuan peraturan perundangan pada SKPD di Wilayah Sulawesi Tengah. Di samping itu Piutang Negara/Daerah yang telah diproses saat ini, banyak yang tidak didukung dengan kelengkapan data seperti data-data perusahaan bila Debitur/Penanggung Utang berbentuk badan hukum, serta tidak adanya barang jaminan utang. Hampir semua debitur/penanggung hutang tidak didukung dengan adanya barang jaminan, walaupun ada jaminan hutang tidak marketable, serta debitur/penanggung hutang tidak diketahui keberadaannya / perusahaannya sudah tutup.
- g. Tidak lengkapnya/ tersedianya berkas piutang negara dan lelang yang mengakibatkan penanganan perkara di pengadilan tidak maksimal.
- h. Sulitnya memperoleh informasi/data dukung yang akurat dari masing-masing seksi dalam pelaksanaan tugas penyajian data informasi/kehumasan karena harus menguasai semua bidang tugas yang

dilaksanakan oleh KPKNL Palu, sehingga data-data dimaksud kurang dapat tersaji dengan baik dan akurat untuk dapat dijadikan acuan bagi pihak yang memerlukan.

- i. Tidak diketahuinya nama penyeter/penanggung utang pada saat pembayaran angsuran dari penanggung utang melalui rekening bank sehingga berakibat bendahara penerimaan mengalami kesulitan dalam memonitor arus uang yang masuk. Untuk itu diperlukan koordinasi antara Bendahara Penerimaan KPKNL Palu dengan pihak penyerah piutang/kreditur secara berkala melalui rekening bank yang tidak diketahui.
- j. Lesunya perekonomian di wilayah kerja KPKNL Palu dikarenakan bencana Gempa Bumi, Likuifaksi, dan Tsunami yang terjadi tanggal 28 September 2018 dan kondisi pandemi *covid-19*.
- k. Perlunya sosialisasi lebih lanjut kepada Pejabat Lelang Kelas I, II, Balai Lelang dan *stakeholder* mengenai peraturan perundang-undangan maupun aplikasi yang menunjang pelayanan seksi lelang. Kurangnya pemahaman pengguna layanan lelang terhadap pelaksanaan lelang lewat elektronik serta jaringan internet yang tidak lancar membuat pelaksanaan lelang elektronik terkendala. Sulitnya pemenang lelang untuk balik nama kendaraan bermotor dalam pelaksanaan lelang khususnya eksekusi barang rampasan berupa kendaraan yang perolehannya berasal dari pembelian yang dibiayai lewat perusahaan pembiayaan/*Leasing* dan belum lunas karena dokumen kepemilikan (BPKB) dikuasai pihak ke III (perusahaan pembiayaan).
- l. Kurangnya pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan kekayaan negara, pengurusan piutang negara dan lelang dalam rangka penanganan perkara terkait sebagai pendukung dalam pelaksanaan tugas.

#### D. Sistematika Pelaporan

Sistematika Laporan Kinerja Tahun 2020 dan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

**Bab I. Pendahuluan**, yang menguraikan secara umum organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic Isus*) yang dihadapi organisasi.

**Bab II. Perencanaan Kinerja**, yang menguraikan tentang ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja KPKNL Palu Tahun 2020.

**Bab III. Akuntabilitas Kinerja**, menguraikan:

A. Capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja dengan:

- membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
- membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu;
- membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
- membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
- menganalisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
- menganalisis efisiensi penggunaan sumber daya; dan
- menganalisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran: Pada subbab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

**Bab IV. Penutup**, pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

**Lampiran.** Perjanjian kinerja, serta lain-lain yang dianggap perlu.

## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja adalah merupakan suatu proses yang dilakukan KPKNL Palu dalam menentukan strategi untuk melakukan kegiatan sesuai sistem. Untuk melaksanakan strategi yang telah ditetapkan oleh organisasi agar mempunyai keunggulan kompetitif, KPKNL Palu perlu menetapkan perjanjian kinerja dalam bentuk Kontrak Kinerja dengan seluruh pegawainya. Penetapan/perjanjian kinerja ini merupakan pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, dan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010.

Sementara itu dokumen Penetapan Kinerja/perjanjian kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Sepanjang tahun berjalan, dilaksanakan kegiatan bimbingan dan konsultasi secara berkala atas kinerja masing-masing pegawai dengan memperhatikan hasil evaluasi kinerja.

Bimbingan dan konsultasi tersebut dilakukan oleh masing-masing atasan langsung secara berjenjang. Pada periode tahun berjalan juga dilakukan penilaian kinerja dan penilaian perilaku. Hasil dari penilaian tersebut dapat dijadikan umpan balik untuk proses pembimbingan dan konsultasi serta perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

Pada tahun 2020 KPKNL Palu memiliki 20 (Dua puluh) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan uraian dari 12 (dua belas) Sasaran Strategis. Target dari 20 IKU KPKNL Palu tahun 2020, disajikan pada tabel di bawah ini.

## KONTRAK KINERJA

NOMOR 8/KN.28/2020

KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PALU  
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA  
KEMENTERIAN KEUANGAN  
TAHUN 2020

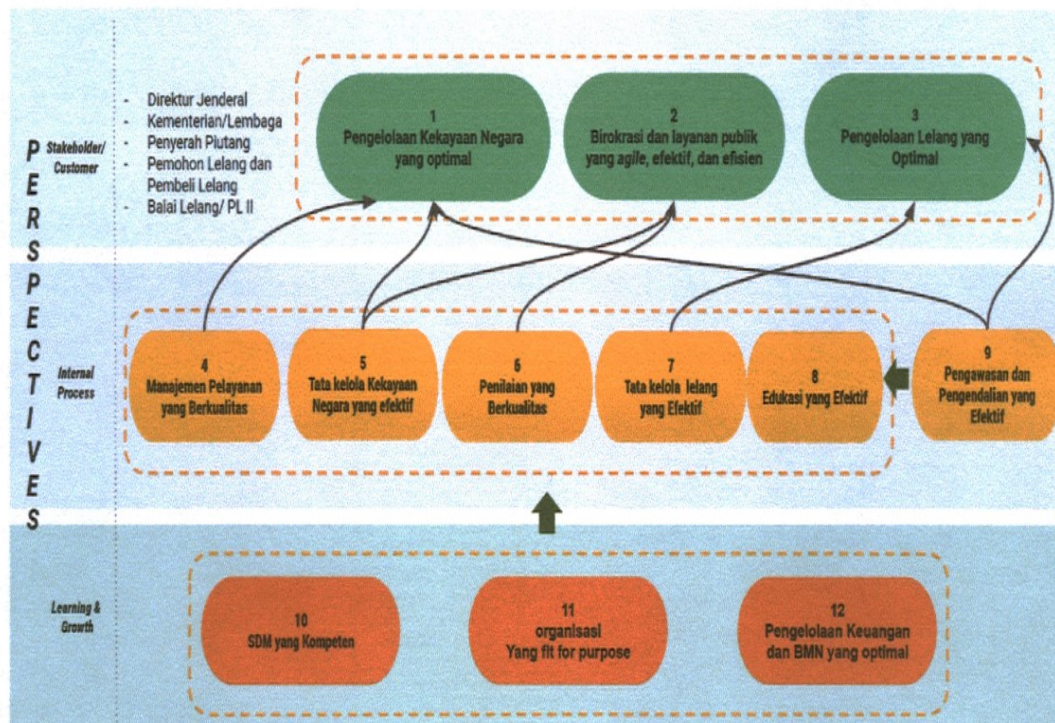


### Pernyataan Kesanggupan

Dalam melaksanakan tugas sebagai Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palu, saya akan :

1. Melaksanakan tugas dan fungsi dengan penuh kesungguhan untuk mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam Kontrak Kinerja ini.
2. Bersedia untuk dilakukan evaluasi atas capaian kinerja kapanpun diperlukan.
3. Menerima segala konsekuensi atas capaian kinerja sesuai dengan peraturan yang berlaku.

### PETA STRATEGI



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020**  
**KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PALU**  
**KANTOR WILAYAH DJKN SULAWESI UTARA, TENGAH, GORONTALO DAN**  
**MALUKU UTARA**  
**DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	
1.	Pengelolaan kekayaan negara yang optimal	1a-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100%
		1b-CP	Tingkat <i>outstanding</i> piutang negara	95%
		1c-N	Persentase pengukuran tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK	100%
2.	Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien	2a-CP	Indeks kepuasan pengguna layanan KPKNL	4.67 (Skala 5)
3.	Pengelolaan lelang yang optimal	3a-CP	Persentase hasil lelang (Pokok Lelang)	100%
4.	<b>Manajemen pelayanan yang berkualitas</b>	4a-CP	Rata-rata indeks ketepatan waktu penyelesaian layanan kekayaan negara dan lelang	87 (skala 100)
5.	Tata kelola kekayaan negara yang efektif	5a-CP	Persentase bidang tanah BMN yang disertipikatkan	100%
		5b-CP	Persentase efektivitas penyelesaian BKPN	100%
		5c-CP	Persentase nilai kekayaan negara yang diutilisasi	100%
		5d-CP	Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	100%
6.	Penilaian yang berkualitas	6a-CP	Deviasi ketergunaan hasil penilaian	30%
7.	Tata kelola lelang yang efektif	7a-CP	Persentase produktivitas lelang	34%
		7b-CP	Persentase pelaksanaan lelang e-auction dan e-conventional auction	90%
8.	Edukasi yang efektif	8a-N	Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi	88
9.	Pengawasan dan pngendalian yang efektif	9a-CP	Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan aset	80%
		9b-CP	Persentase tindak lanjut penyelesaian/perbaikan atas sisa aset objek penilaian kembali BMN	100%
10.	SDM yang kompeten	10a-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	100%

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
11.	Organisasi yang <i>fit for purpose</i>	11a-N Nilai hasil <i>review</i> pengelolaan kinerja berbasis BSC	70 (skala 100)
		11b-N Indeks efektivitas penyelenggaraan FGD Kode Etik Pegawai	80 (skala 100)
12.	Pengelolaan BMN dan keuangan yang optimal	12a-CP Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95%

Kegiatan, <i>Ouput</i> , dan Indikator <i>Output</i>	Anggaran
1. Surat Persetujuan/Penolakan atas Permohonan Pengelolaan BMN	Rp165.049.000,00
2. Rekomendasi BMN berupa Tanah yang Disertipikatkan (PU)	Rp14.436.000,00
3. Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan BMN	Rp26.100.000,00
4. Kajian Portfolio Aset (PU)	Rp29.630.000,00
5. Dokumen Pengurusan Piutang Negara	Rp37.278.000,00
6. Risalah Lelang	Rp87.384.000,00
7. Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Rp329.649.000,00
8. Layanan Dukungan Manajemen Satker	Rp20.760.000,00
9. Layanan Perkantoran	Rp3.401.196.000,00

Manado, 30 Januari 2020

Kepala Kantor Wilayah DJKN Sulawesi Utara Tengah Gorontalo dan Maluku Utara,

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Palu

Aloysius Yanis Dhaniarto  
NIP 196601261991031001

Devi Lesilolo  
NIP 196503031985031001

**RINCIAN TARGET CAPAIAN KINERJA  
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PALU  
KANTOR WILAYAH DJKN SULAWESI UTARA, TENGAH, GORONTALO DAN  
MALUKU UTARA  
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA TAHUN 2020**

No	SS, IKU	Target							
		Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	
1	Pengelolaan kekayaan negara yang optimal								
	1a-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	5%	30%	30%	75%	75%	100%	100%
	1b-CP	Tingkat <i>outstanding</i> piutang negara	99%	98%	98%	97%	97%	95%	95%
	1a-N	Persentase Pengukuran Tingkat kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
2	Birokrasi dan layanan publik yang <i>agile</i> , efektif, dan efisien								
	2a-CP	Indeks kepuasan pengguna layanan KPKNL	-	-	-	-	-	4.67	4.67 (Skala 5)
3	Pengelolaan lelang yang optimal								
	3a-CP	Persentase hasil lelang (Pokok Lelang)	10%	30%	30%	60%	60%	100%	100%
4	Manajemen pelayanan yang berkualitas								
	4a-CP	Rata-rata indeks ketepatan waktu penyelesaian layanan kekayaan negara dan lelang	87	87	87	87	87	87	87 (skala 100)
5	Tata kelola kekayaan negara yang efektif								
	5a-CP	Persentase bidang tanah BMN yang disertipikatkan	-	20%	20%	60%	60%	100%	100%
	5b-CP	Persentase efektivitas penyelesaian BKPN	10%	40%	40%	75%	75%	100%	100%

No	SS, IKU	Target							
		Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	
	5c-CP	Persentase nilai kekayaan negara yang diutilisasi	5%	30%	30%	60%	60%	100%	100%
	5d-CP	Persentase implementasi evaluasi kinerja BMN (portofolio aset)	25%	50%	50%	80%	80%	100%	100%
6	Penilaian yang berkualitas								
	6a-CP	Deviasi ketergunaan hasil penilaian	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%
7	Tata kelola lelang yang efektif								
	7a-CP	Persentase produktivitas lelang	15%	20%	20%	25%	25%	34%	34%
	7b-CP	Persentase pelaksanaan lelang e-auction dan e-conventional auction	10%	30%	30%	50%	50%	90%	90%
8	Edukasi yang efektif								
	8a-N	Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi	-	88	88	-	88	88	88
9	Pengawasan dan pengendalian yang efektif								
	9a-CP	Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan aset	-	40%	40%	-	40%	80%	80%
	9b-CP	Persentase tindak lanjut penyelesaian/perbaikan atas sisa aset objek penilaian kembali BMN	10%	25%	25%	75%	75%	100%	100%
10	SDM yang kompeten								
	10a-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	15%	40%	40%	75%	75%	100%	100%
11	Organisasi yang <i>fit for purpose</i>								
	11a-N	Nilai hasil review pengelolaan kinerja	-	-	-	-	-	70	70 (skala

No	SS, IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
	berbasis BSC							100)
	11b- N indeks efektivitas penyelenggaraan FGD Kode Etik Pegawai	80	80	80	80	80	80	80 (skala 100)
12	Pengelolaan BMN dan keuangan yang optimal							
	12a- CP Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%

Manado, 31 Januari 2020

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan  
Lelang Palu

Devi Lesilolo  
NIP 196503031985031001

### Sasaran Kerja Pegawai

No	I. PEJABAT PENILAI		No	II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI	
1	Nama	Aloysius Yanis Dhaniarto	1	Nama	Devi Lesilolo
2	NIP	196601261991031001	2	NIP	196503031985031001
3	Pangkat/ Gol. Ruang	Pembina Utama Muda, IV/c	3	Pangkat/ Gol. Ruang	Pembina, IV/a
4	Jabatan	Kepala Kantor Wilayah	4	Jabatan	Kepala Kantor
5	Unit Kerja	Kantor Wilayah DJKN Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara	5	Unit Kerja	Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palu

No	III. KEGIATAN TUGAS POKOK JABATAN	ANGKA KREDIT	TARGET			
			KUANTITAS/ OUTPUT	KUALITAS/ MUTU	WAKTU	BIAYA
1	Meningkatkan realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	-	100%	100	12 bulan	-
2	Mengurangi nilai <i>outstanding</i> piutang negara	-	5%	100	12 bulan	-
3	Melaksanakan pengukuran tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK	-	100%	100	12 bulan	-
4	Meningkatkan Kepuasan Pengguna Layanan Kanwil dan KPKNL	-	4.79 (Skala 5)	100	12 bulan	-
5	Meningkatkan hasil lelang (Pokok lelang)	-	100%	100	12 bulan	-
6	Menyelesaikan layanan kekayaan negara dan lelang dengan tepat waktu	-	87 (skala 100)	100	12 bulan	-
7	Meningkatkan bidang tanah BMN yang disertipikatkan	-	100%	100	12 bulan	-
8	Menyelesaikan BKPN	-	100%	100	12 bulan	-
9	Menetapkan nilai kekayaan negara yang diutilisasi	-	100%	100	12 bulan	-
10	menerapkan evaluasi kinerja BMN	-	100%	100	12 bulan	-
11	Meningkatkan ketergunaan hasil penilaian	-	70%	100	12 bulan	-
12	Meningkatkan produktivitas lelang	-	34%	100	12 bulan	-

No	III. KEGIATAN TUGAS POKOK JABATAN	ANGKA KREDIT	TARGET			
			KUANTITAS/ OUTPUT	KUALITAS/ MUTU	WAKTU	BIAYA
13	Mengimplementasikan e-auction dan e-conventional auction	-	90%	100	12 bulan	-
14	Mewujudkan efektivitas edukasi dan komunikasi	-	88	100	12 bulan	-
15	Menindaklanjuti persetujuan pengelolaan aset	-	80%	100	12 bulan	-
16	Menindaklanjuti penyelesaian/perbaikan atas Sisa Aset Objek Penilaian Kembali BMN	-	100%	100	12 bulan	-
17	Mengembangkan kompetensi pegawai	-	100%	100	12 bulan	-
18	Mewujudkan pengelolaan kinerja berbasis BSC yang baik	-	70 (skala 100)	100	12 bulan	-
19	Meningkatkan efektivitas penyelenggaraan FGD kode etik pegawai	-	80 (skala 100)	100	12 bulan	-
20	Meningkatkan kualitas pelaksanaan anggaran	-	95%	100	12 bulan	-

Manado, 30 Januari 2020

Pejabat Penilai,

PNS yang Dinilai,

Aloysius Yanis Dhaniarto  
NIP 196601261991031001

Devi Lesilolo  
NIP 196503031985031001

**INISIATIF STRATEGIS  
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PALU  
KANTOR WILAYAH DJKN SULAWESI UTARA, TENGAH, GORONTALO DAN  
MALUKU UTARA  
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA  
KEMENTERIAN KEUANGAN  
TAHUN 2020**

No	Indikator Kinerja Utama	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya
1	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	Pengelolaan kekayaan negara yang optimal	1. Meningkatkan pengelolaan BMN yang memberikan manfaat sosial dan ekonomi terhadap masyarakat 2. BMN berupa tanah dan/atau bangunan yang terindikasi <i>underutilized/ idle</i> yang tidak sedang dimanfaatkan diajukan pemanfaatannya	12 Bulan  12 Bulan	Seksi PKN  Seksi PKN	

Manado, 30 Januari 2020  
Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang  
Palu,

Devi Lesilolo  
NIP 196503031985031001

## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. Capaian Kinerja Organisasi (NKO)

Pada subbab ini akan disajikan capaian kinerja organisasi KPKNL Palu untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Adapun Capaian kinerja KPKNL Palu 2020, disajikan pada tabel pada halaman 26-27 berikut.

Dari hasil evaluasi kinerja terhadap 20 (dua puluh) IKU *Kemenkeu-Three* Tahun 2020 diperoleh hasil analisis kinerja atas pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama *Kemenkeu-Three* sebagai berikut :

#### NILAI KINERJA ORGANISASI (NKO) 2020 KPKNL PALU

Kode	IKU	V/C	Target 2020	Realisasi 2020	Bobot Awal	Bobot Akhir IKU	Indeks Tanpa Batas	Indeks Max. 120%	Keterangan
	Stakeholder / Customer Perspective (40%)							35,59%	
1	Pengelolaan kekayaan negara yang optimal							93,19%	
1a-CP	Persentase penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	P/M	100%	59,52%	14%	36%	59,522%	59,52%	merah
1b-CP	Tingkat Penurunan outstanding piutang negara (Saldo PNDS s.d 2016)	P/M	3%	3,62%	14%	36%	120,542 %	120,00%	hijau
1c-N	Persentase pengukuran Tingkat kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	P/H	100%	101,91%	11%	28%	101,91%	101,91%	hijau
2	Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien							102,78%	
2a-CP	Indeks kepuasan pengguna layanan KPKNL	E/M	4,67	4,80	21%	100%	102,78%	102,78%	hijau
3	Pengelolaan lelang yang optimal							70,99%	
3a-CP	Persentase hasil lelang (Pokok Lelang)	P/M	100%	70,99%	14%	100%	70,99%	70,99%	merah
	Internal Process Perspective (30%)							32,68%	
4	Manajemen pelayanan yang berkualitas							105,48%	
4a-CP	Indeks ketepatan waktu penyelesaian layanan kekayaan negara dan lelang	P/H	87	91,77	11%	100%	105,48%	105,48%	hijau
5	Tata kelola kekayaan negara yang efektif							107,77%	
5a-CP	Persentase bidang tanah BMN yang disertifikatkan	P/L	100%	100,00%	19%	33%	100,00%	100,00%	hijau

5b-CP	Persentase efektivitas penyelesaian BKPN	P/M	100%	120,00%	14%	24%	120,00%	120,00%	hijau
5c-CP	Persentase nilai kekayaan negara yang diutilisasi	P/M	100%	106,77%	14%	24%	106,77%	106,77%	hijau
5d-CP	Persentase implementasi evaluasi kinerja BMN (portofolio aset)	P/H	100%	106,90%	11%	19%	106,90%	106,90%	hijau
6	Penilaian yang berkualitas							120,00%	
6a-CP	Deviasi ketergunaan hasil penilaian	P/M	30%	1,37%	14%	100%	195,43%	120,00%	hijau
7	Tata kelola lelang yang efektif							114,73%	
7a-CP	Persentase produktivitas lelang	P/M	34%	42,62%	14%	50%	125,35%	120,00%	hijau
7b-CP	Persentase pelaksanaan lelang e-auction dan e-conventional auction	P/M	90%	98,51%	14%	50%	109,45%	109,45%	hijau
8	Edukasi yang efektif							102,02%	
8a-N	Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi	P/M	88	89,78	14%	100%	102,02%	102,02%	hijau
9	Pengawasan dan pengendalian yang efektif							103,69%	
9a-CP	Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan aset	P/M	80%	88,64%	14%	50%	110,80%	110,80%	hijau
9b-CP	Persentase tindak lanjut penyelesaian/perbaikan atas sisa aset objek penilaian kembali BMN	P/M	100%	96,58%	14%	50%	96,58%	96,58%	Kuning
	Learning & Growth Perspective (30%)							33,84%	
10	SDM yang kompeten							120,00%	
10a-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	P/M	100%	120,00%	14%	100%	120,00%	120,00%	hijau
11	Organisasi yang fit for purpose							116,96%	
11a-N	Nilai hasil review pengelolaan kinerja berbasis BSC	P/M	70	79,74	14%	50%	113,91%	113,91%	hijau
11b-N	indeks efektivitas penyelenggaraan FGD Kode Etik Pegawai	P/M	80	97,05	14%	50%	121,31%	120,00%	hijau
12	Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Optimal							101,41%	
12a-CP	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	P/M	95%	96,34%	14%	100%	101,41%	101,41%	hijau
<b>Nilai Kinerja Organisasi (NKO)</b>								<b>102,11%</b>	<b>hijau</b>

## 1) Sasaran Strategis Pengelolaan kekayaan negara yang optimal

### a. IKU Persentase penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan Negara dan lelang

- Realisasi capaian IKU persentase penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang tahun 2020 sebesar Rp9.450.968.574 (59,52%) dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp15.878.000.000 (100%), IKU ini terdiri dari 3 (tiga) komponen PNBPN Pengelolaan BMN, PNBPN Piutang Negara, dan PNBPN Lelang. Realisasi penerimaan Negara dari pengelolaan kekayaan Negara dan lelang sampai Desember 2020 belum mencapai target yang telah ditetapkan.
- Pendapatan dari pengelolaan BMN sebagian besar disandarkan pada penjualan BMN berupa kendaraan, sewa atas kantin, atm, dan gudang, sehingga sulit untuk dapat memenuhi target yang ditetapkan. Hal tersebut merupakan implikasi dari isu-isu berikut, diantaranya situasi pandemi yang menimpa perekonomian dan juga perekonomian di Provinsi Sulawesi Tengah belum normal/masih lesu khususnya Kota Palu, Sigi, dan Donggala pasca gempa bumi tahun 2018.
- Langkah yang diambil yaitu upaya sosialisasi dan penggalian potensi pengelolaan BMN melalui pemanfaatan dan penjualan BMN kepada para satuan kerja.

### b. IKU Tingkat Penurunan outstanding piutang Negara (Saldo PNDS s.d 2016)

- Realisasi capaian IKU Tingkat Penurunan outstanding piutang Negara (Saldo PNDS s.d 2016) tahun 2020 sebesar Rp683.302.765 (3,6%) dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp566.857.150,98 (3% dari Rp18.895.238.366) yang telah ditetapkan. Hal ini mencerminkan sampai Desember 2020 telah mencapai target yang telah ditetapkan. Upaya yang telah dilakukan dalam menghadapi debitur yang kurang kooperatif, dan debitur tidak ditemukan keberadaannya diantaranya dengan optimalisasi upaya penagihan, salah satunya dengan menghubungi penanggung hutang

secara intens dan berkoordinasi secara simultan kerjasama dengan beberapa instansi terkait seperti Ditjen AHU Kemenkumham dalam hal penanggung hutang berupa badan usaha berbentuk Perseroan.

### **c. IKU Persentase pengukuran Tingkat kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK**

Realisasi IKU Persentase pengukuran Tingkat kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK tahun 2020 sebesar 427 (101,91) dari target yang telah ditetapkan 419 (100%). Hal ini mencerminkan pelaksanaan IKU persentase pengukuran Tingkat kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK tahun 2020 telah berjalan dengan baik. Hambatan yang dialami yaitu lambatnya pengumpulan form dari satker yang terlibat dalam proses IKU SBSK, tentu saja hal ini diakibatkan status pandemi COVID-19 yang tidak memungkinkan melakukan pelaksanaan perhitungan secara langsung sehingga memerlukan bantuan satuan kerja. Untuk itu, koordinasi dengan satuan kerja yang lebih intens harus dilakukan.

## **2) Sasaran Strategis Birokrasi dan Layanan Publik Yang Agile, Efektif, dan Efisien**

### **IKU Kepuasan Pengguna Layanan Pada Kantor Pelayanan**

-Indeks kepuasan pengguna layanan KPKNL Palu tahun 2020 telah mencapai angka 4,80 (102,78%) diatas target yang ditetapkan sebesar 4,67. Dalam rangka meningkatkan kepuasan pelanggan, KPKNL Palu tahun 2020 akan lebih meningkatkan kualitas pelayanan dan penyelesaian pekerjaan sesuai dengan SOP layanan unggulan. Bila target 2020 dan realisasi capaiannya dibandingkan dengan periode sebelumnya, dari target sebesar 4,79 realisasi sampai akhir tahun 2019 mencapai 4,80 (101,67) sehingga terjadi peningkatan sebesar 1,11% dari tahun sebelumnya. Survei indeks kepuasan pengguna layanan dilakukan kepada stakeholder dari Seksi Penilaian, Seksi Pelayanan Lelang, Seksi PKN, dan Seksi Piutang Negara. Selain itu, hal yang harus diperhatikan agar mendapatkan hasil survey yang

diharapkan yaitu menentukan responden dari *stakeholder* dan memastikan kesamaan persepsi *stakeholder* dalam memahami kuesioner.

### 3) Sasaran Strategis Pengelolaan Kekayaan Negara Yang Optimal

#### **IKU Persentase Hasil lelang (Pokok Lelang)**

Realisasi capaian IKU Persentase Hasil lelang (Pokok Lelang) di tahun 2020 adalah sebesar Rp90.826.812.445,- (70,99%) dari target Rp127.950.000.000,- (100%) dari 2 (dua) komponen Pokok Lelang Kelas I dan Pokok Lelang Pegadaian. Hal ini mencerminkan belum tercapainya realisasi IKU Persentase Hasil lelang (Pokok Lelang). Beberapa isu utama yang menyebabkan tidak tercapainya IKU tersebut yaitu Terdapat objek lelang yang SKPT/SKT-nya tidak terbit, Nilai limit lelang HT yang relatif tinggi dan objek lelang tidak marketable, sering terjadi lelang TAP, terutama dari lelang UUHT, dan animo dan daya beli masyarakat terhadap lelang masih rendah/kurang diakibatkan situasi pandemi yang menerpa perekonomian dan juga perekonomian di Provinsi Sulawesi Tengah belum normal/masih lesu khususnya Kota Palu, Sigi, dan Donggala pasca gempa bumi tahun 2018.

### 4) Sasaran Strategis Manajemen Pelayanan Yang Berkualitas

#### **IKU Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Layanan Kekayaan Negara dan Lelang**

Realisasi IKU indeks ketepatan waktu penyelesaian layanan kekayaan Negara dan Lelang sebesar 105,48% dari target 87 sudah tercapai 91,77 dan bila dibandingkan tahun 2019 sebelumnya dengan capaian 97,25 (115,02%) atau terjadi penurunan sebesar 9,54% diperoleh dari penyelesaian SOP layanan unggulan dari masing-masing Seksi (Pengelolaan Kekayaan Negara, Piutang Negara, Hukum dan Informasi, dan Pelayanan Lelang) KPKNL Palu tahun 2020. Hal ini merupakan bentuk fleksibilitas dalam bekerja meskipun dalam situasi pandemi, yang menyebabkan tidak adanya pelayanan secara langsung. Detail realisasi IKU tersebut dengan rincian sebagai berikut:

**Lampiran:**

**Perhitungan IKU Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Layanan  
Kekayaan Negara dan Lelang**

**KPKNL PALU**

**Sampai dengan Q4 Bulan Desember 2020**

No	Jenis Layanan	Capaian
<b>A</b>	<b>Layanan yang Menjadi Objek Pemantuan Pengendalian Intern</b>	
1	Persetujuan/Penolakan Permohonan Sewa BMN Berupa Tanah dan/atau Bangunan (Integrasi Layanan) pada KPKNL	80,0000
2	Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara Berupa Tanah dan/atau Bangunan pada KPKNL	99,1589
3	Persetujuan/Penolakan Penjualan BMN Selain Tanah dan/atau Bangunan pada KPKNL	64,2424
4	Penetapan Jadwal Lelang	98,9252
5	Pelayanan Pengembalian Uang Jaminan Penawaran Lelang	NIHIL
6	Pelayanan Pemberian Kuitansi Pembayaran Harga Lelang	100,0000
7	Pelayanan Pemberian Kutipan Risalah Lelang dan Dokumen Kepemilikan Barang	100,0000
8	Penyetoran Hasil Bersih Lelang (Kas Negara)	100,0000
9	Penyetoran Hasil Bersih Lelang (selain Kas Negara)	100,0000
10	Pelayanan Permohonan Keringanan Utang pada KPKNL	NIHIL
11	Pelayanan Permohonan Penarikan Pengurusan Piutang Negara	NIHIL
12	Pelayanan Permohonan Penebusan Barang Jaminan Senilai/di Atas Nilai Pengikatan	NIHIL
13	Penerbitan Surat Pernyataan Piutang Negara Lunas	NIHIL
14	Penerbitan Surat Pernyataan Piutang Negara Selesai	NIHIL
Rata-Rata Nilai Capaian		92,79

**5) Sasaran Strategis Tata kelola kekayaan negara yang efektif**

**a. IKU Persentase bidang tanah BMN yang disertifikatkan**

Jumlah BMN berupa bidang tanah yang telah diidentifikasi telah maupun belum bersertifikat pada kementerian lembaga didasarkan pada data aplikasi SIMANTAP. Pada tahun 2020 target sertifikasi bidang tanah sebanyak 62 objek dan telah tercapai sebanyak 62 bidang tanah (100%). Bila dibandingkan sebelumnya target 150 objek sertifikat tanah dengan capaian 150 bidang tanah (100%), hal ini mencerminkan IKU persentase bidang tanah BMN yang disertifikatkan telah mencapai 100%. Hal ini dicapai dengan dilakukannya koordinasi pihak satker dan Kantor Pertanahan secara intens

dan upaya updating verifikasi pada aplikasi Sistem Informasi Manajemen Aset Tetap (SIMANTAP).

#### **b. IKU Persentase efektivitas penyelesaian BKPN**

Realisasi persentase efektivitas penyelesaian BKPN tahun 2020 sebesar 120% dari target 100%, target 5 BKPN dengan capaian penyelesaian 6 BKPN. Hal ini mencerminkan pencapaian IKU telah terpebuhi dengan baik. Adapun langkah-langkah yang diambil untuk mencapai realisasi tersebut yaitu dengan menghubungi penanggung hutang secara intens dan berkoordinasi secara simultan kerjasama dengan beberapa instansi terkait seperti Ditjen AHU Kemenkumham dalam hal penanggung hutang berupa badan usaha berbentuk Perseroan.

#### **c. IKU Persentase nilai kekayaan negara yang diutilisasi**

Nilai kekayaan negara yang diutilisasi pada KPKNL Palu pada tahun 2020 ditargetkan sebesar Rp3.707.710.000,- dimana realisasi sampai dengan akhir bulan Desember tahun 2020 mencapai Rp3.958.747.884.803,-. Pencapaian target ini diperoleh dari penetapan status penggunaan barang milik Negara (BMN) dan pemanfaatan BMN. Realisasi tersebut telah melebihi target yang ditetapkan dan jika dipersentasekan capaiannya sebesar 106,77%. Bila target 2019 dan realisasi capaiannya dibandingkan dengan periode sebelumnya, dari target sebesar Rp1.985.000.000.000, realisasi sampai akhir tahun 2019 mencapai Rp2.693.389.400.661,- dan jika dipersentasekan sebesar 134,35% atau terjadi penurunan sebesar 27,58%.

Pencapaian nilai kekayaan negara yang diutilisasi pada tahun 2020 sebagian besar bersamaan Satker K/L mengajukan usul penetapan status penggunaan barang milik Negara dan pemanfaatan barang milik Negara. Kendala yang dihadapi diantaranya yaitu Kurangnya kesadaran satker terkait penginputan data utilisasi di aplikasi SIMAN, Rendahnya kompetensi SDM pada satker. Untuk mengantisipasi hal tersebut, KPKNL Palu berupaya melakukan pemetaan BMN yang belum ditetapkan status penggunaannya dan satuan-satuan kerja terkait, koordinasi dengan satuan-satuan kerja

dengan nilai aset BMN terbesar (PUPR), dan sosialisasi dan koordinasi melalui telekonferensi kepada satuan kerja.

#### **d. IKU Persentase implementasi evaluasi kinerja BMN (portofolio aset)**

Realisasi capaian IKU Persentase implementasi evaluasi kinerja BMN (portofolio aset) mencapai sebesar 62 dari target 58, atau sebesar 106,90% dari target yang telah ditetapkan sebesar 100%. Hal ini mencerminkan pelaksanaan IKU Persentase implementasi evaluasi kinerja BMN (portofolio aset) telah dijalankan dengan baik. Langkah pergeseran objek evaluasi kinerja yang berada di luar kota menjadi BMN pada satuan kerja tertentu yang lokasinya ada di dalam kota Palu dirasa tepat mengingat situasi pandemi menyebabkan mobilitas pegawai menjadi menurun.

### **6) Sasaram Strategis Penilaian yang berkualitas**

#### **IKU Deviasi ketergunaan hasil penilaian**

Realisasi capaian IKU deviasi ketergunaan hasil penilaian sebesar 1,37% dari target 30% (dengan indeks 195,43%). Hal ini mencerminkan hasil penilaian oleh Tim Penilai KPKNL Palu sebesar 98,63 digunakan dalam surat keputusan persetujuan sehingga telah melampaui target yang telah ditetapkan. Kendala yang dihadapi selain pandemi yang menyebabkan menurunnya mobilitas pegawai, adalah nilai yang diajukan Satker lebih tinggi daripada nilai wajar yang dihasilkan setelah dilakukan penilaian dan data isian pada form yang disampaikan satker tidak valid (khusus dalam hal penilaian yang tidak dilakukan survei lapangan). Karenanya, perlu dilakukan koordinasi dengan satker terkait permohonan penilaian yang diajukan serta meminta data yang dibutuhkan guna membantu dalam analisa perhitungan nilai dan sosialisasi Perdirjen No 6/KN/2020 terkait pelaksanaan penilaian di masa pandemi COVID-19.

### **7) Sasaram Strategis Tata kelola lelang yang efektif**

#### **a. IKU Persentase produktivitas lelang**

Realisasi frekuensi lelang selama tahun 2020 mencapai 420 kali. Ini berarti persentase capaian sebesar 42,62 % dari target sebesar 34 % (dengan

indeks 125,35%). Target penerimaan pokok lelang 2020 adalah sebesar Rp44.100.000.000,- dan hanya dapat direalisasikan sebesar Rp31.096.933.345,- dengan realisasi 70,99%. Bila dibandingkan dengan tahun 2019 persentase capaian sebesar 43,15% dengan indeks (134%) dari target 32%, terjadi penurunan sebesar 8,65%. Besaran realisasi yang hanya 42,62% dari target, meskipun telah dilakukan sosialisasi dengan pembeli potensial sebelum pelaksanaan lelang namun belum pulihnya perekonomian kota Palu secara keseluruhan adanya dampak dari gempa bumi, likuifaksi, dan tsunami yang melanda Kota Palu, Kab. Sigi, dan Kab. Donggala pada tanggal 28 September 2018 silam, dan kondisi pandemi covid-19 yang mengakibatkan adanya penarikan berkas lelang dari pemohon lelang.

#### **b. IKU Persentase pelaksanaan lelang e-auction dan e-conventional auction**

Realisasi IKU capaian persentase pelaksanaan lelang e-auction dan e-conventional auction sebesar 98,51% dari target 90% (dengan indeks 109,45%). Hal ini mencerminkan pelaksanaannya telah sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Tentu pandemi menjadikan semua pengguna layanan agar lelang diselenggarakan secara daring (*e-auction*).

### **8) Sasaran Strategis Edukasi Yang Efektif**

#### **IKU Tingkat Efektivitas Edukasi dan Komunikasi**

Tingkat efektifitas edukasi dan komunikasi pada tahun 2020 menghasilkan indeks 89,78 dari indeks target sebesar 88, atau sebesar 102,02%. Jika dibandingkan indeks capaian yang dihasilkan tahun sebelumnya yang sebesar 89,65 dari indeks yang telah ditetapkan 87 (103,05% dari target), maka persentase capaian terhadap target untuk tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 1,03%.

Kegiatan dalam IKU ini meliputi sosialisasi penatausahaan dan pengelolaan BMN yang dilaksanakan oleh seksi PKN maupun terkait lelang yang dilakukan KPKNL Palu oleh Seksi Pelayanan Lelang dan Seksi Piutang

Negara serta sebagai narasumber pada sosialisasi yang dilaksanakan beberapa satker K/L maupun pemerintahan provinsi/kota/ kabupaten.

## **9) Sasaran Strategis Pengawasan dan pengendalian yang efektif**

### **a. IKU Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan aset**

Realisasi IKU persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan aset tahun 2020 adalah sebesar 88,64% (indeks 110,8%) dari target sebesar 80%. Meski begitu, ke-tidak segera-an satker dalam menindak lanjuti Surat Persetujuan yang diterbitkan kerap terjadi dan bahkan masih banyak yang belum menaati peraturan terkait pengelolaan BMN.

### **b. IKU Persentase tindak lanjut penyelesaian/perbaikan atas sisa aset objek penilaian kembali BMN**

Realisasi IKU persentase tindak lanjut penyelesaian/perbaikan atas sisa aset objek penilaian kembali BMN tahun 2020 adalah sebesar 96,58% dari target sebesar 100%. Hal ini mencerminkan realisasi IKU belum tercapai. Capaian ini didasarkan dengan kendala diantaranya yaitu Kapasitas dan kapabilitas satuan-satuan kerja dalam pelaksanaan perbaikan penilaian kembali masih rendah dan penggantian petugas BMN pada beberapa satuan kerja cukup cepat dan alih pengetahuan tidak berjalan dengan baik. Untuk itu KPKNL Palu mengambil langkah koordinasi pada satuan-satuan kerja di 9 K/L yang memiliki sisa aset objek penilaian kembali BMN yang terbesar untuk penyelesaiannya.

## **10) Sasaran Strategis SDM yang Kompeten**

### **IKU Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai**

Realisasi IKU persentase pengembangan kompetensi pegawai tahun 2020 adalah sebesar 120% (indeks 120%) dari target sebesar 100%. Dan bila dibandingkan tahun sebelumnya dengan capaian sebesar 94% (indeks 108,31%) dari target 87%, terjadi peningkatan sebesar 11,69%. Hal ini dapat tercapai karena posisi penempatannya telah sesuai dengan pendidikan dan pelatihan yang pernah diikuti. Selain itu kegiatan *sharing knowledge* secara periodik sebagai upaya pemenuhan kompetensi dalam hal jam pelatihan.

## 11) Sasaran Strategis Organisasi yang fit for purpose

### a. IKU Nilai hasil review pengelolaan kinerja berbasis BSC

Realisasi nilai hasil review pengelolaan kinerja berbasis BSC di tahun 2020 adalah sebesar 79,74 dari target IKU 70 (indeks 113,91%). Hal ini tetap mencerminkan kualitas pengelolaan kinerja di KPKNL Palu sudah baik. Beberapa hal yang perlu ditingkatkan yaitu pemahaman pegawai atas pengelolaan kinerja berbasis BSC. Untuk itu, perlu dilakukan kegiatan sosialisasi tentang pengelolaan kinerja pada KPKNL Palu.

### b. IKU indeks efektivitas penyelenggaraan FGD Kode Etik Pegawai

Realisasi indeks efektivitas penyelenggaraan FGD Kode Etik Pegawai di tahun 2020 adalah sebesar 97,05 dari target IKU 80 (indeks 121,31%). Hal ini dilakukan dengan mengupayakan agar materi yang disampaikan pada saat FGD lebih familiar dan disesuaikan dengan kondisi saat ini.

## 12) Sasaran Strategis Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Optimal IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran

Untuk persentase kualitas pelaksanaan anggaran KPKNL Palu telah mencapai target yang direncanakan yaitu sebesar 96,34 % dari target 95 % (101,41% dari target). Bila dibandingkan tahun sebelumnya mencapai target sebesar 90,42% dari target 95% bila diindeks (95,18%), terjadi kenaikan sebesar 6,23%. Dalam IKU ini terdiri dari 2 (dua) komponen dari capaian SMART DJA dengan bobot 60% dari 96,92% (berdasar capaian SMART DJA 31 Desember 2020) dan IKPA 40% dari 95,46 dengan 13 (tigabelas) hal yang menjadi unsur perhitungan yaitu persentase capaian pengelolaan UP, data kontrak, kesalahan SPM, retur SP2D, Hal III DIPA, revisi DIPA, penyelesaian Tagihan, konfirmasi Capaian Output, rekon LPJ, perencanaan Kas, realiasi, pagu Minus, dispensasi SPM.

Selama tahun 2020 KPKNL Palu telah melaksanakan pengelolaan anggaran dengan cukup baik dengan catatan telah berhasil dikarenakan target IKU persentase kualitas pelaksanaan anggaran tercapai sebesar 96,34% dari target 95%. Pelaksanaan anggaran telah optimal ini harus

menjadi evaluasi agar tahun depan pelaksanaan anggaran dapat dilaksanakan dengan baik, terencana, dan terorganisir dengan baik serta mengacu pada kontrak kinerja Kemenkeu-*three*. Kendala yang dialami yaitu Nilai penyerapan anggaran atas pagu netto rendah, target IKU yang diamanatkan tidak tercapai. Karena itu, KPKNL Palu melakukan pemetaan RPD ulang, percepatan belanja modal, dan mengintruksikan seluruh unit untuk membuat rencana kerja perjalanan dinas dan juga melakukan revisi anggaran sesuai arahan terkait pandemi.

## B. Realisasi Anggaran

Realisasi Anggaran dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan, diperlukan dukungan sumber daya keuangan guna membiayai program dan kegiatan dimaksud. Sumber pembiayaan pelaksanaan kegiatan KPKNL Palu berasal sepenuhnya dari APBN yang dituangkan dalam DIPA nomor SP DIPA-015.09.2.538002/2020 tanggal 12 November 2019 yang terinci dalam tabel berikut.

No	Uraian	Pagu DIPA	Blokir	Sisa Pagu	Realisasi	
					Rp	%
1	Belanja Pegawai	1.084.014.000	0	27.331.311	1.056.682.689	97,48
2	Belanja Barang	1.753.395.000	0	281.115.218	1.472.279.784	83,97
3	Belanja Modal	300.200.000	0	0	300.200.000	100,00
	Total	3.137.809.000		308.446.527	2.829.162.473	90,17

Besarnya realisasi DIPA untuk tahun 2020 adalah sebesar Rp.2.829.162.473,- dari target sebesar Rp.3.137.809.000,-. Realisasi penyerapan DIPA untuk tahun anggaran 2020 dimaksud telah sesuai digunakan untuk membiayai kegiatan sebagaimana tertuang dalam Rencana Kinerja Tahun 2020, dan dari aspek keuangan itu sendiri telah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan Negara.

## BAB IV

### PENUTUP

Laporan Kinerja tahun 2020 dan Perjanjian Kinerja tahun 2020 adalah merupakan amanat dalam Permenpan Nomor 53 tahun 2014 bahwa Menteri/Pimpinan lembaga menyusun Laporan Kinerja tahunan tingkat Kementerian/Lembaga berdasarkan perjanjian kinerja yang ditandatangani dan menyampaikan kepada Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Menteri Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Berdasarkan hal tersebut KPKNL Palu menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud, yang merupakan suatu perwujudan pertanggungjawaban hasil perjanjian kinerja yang telah disepakati antara pimpinan dan bawahan dari sebuah fungsi pekerjaan atau aktivitas selama periode tertentu untuk mencapai tujuan organisasi. Pertanggungjawaban atas pencapaian pelaksanaan tugas dan fungsi KPKNL Palu sebagai unsur penyelenggara pemerintahan dengan kewenangan yang diberikan dalam melakukan pengelolaan dan penilaian kekayaan negara, pengurusan piutang negara dan lelang, dan sekaligus berperan dalam penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dalam rangka peningkatan *good governance* yang mengacu pada rencana strategis KPKNL Palu lima tahunan (2020-2024). Pengukuran kinerja sasaran didasarkan pada penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU). Pada tahun 2020 telah ditetapkan 12 sasaran strategis dan 20 IKU yang merupakan indikator Kontrak Kinerja KPKNL Palu tahun 2020.

Secara umum pencapaian sasaran strategis selama tahun 2020 sebagian besar telah sesuai dengan target yang telah ditetapkan, namun ada IKU masih merah yaitu IKU persentase penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang, dan IKU persentase hasil lelang (Pokok Lelang) serta satu IKU masih kuning adalah IKU persentase tindak lanjut penyelesaian/perbaikan atas sisa aset objek penilaian kembali BMN. Pencapaian kinerja secara keseluruhan tersebut merupakan hasil kerja seluruh staf, pegawai dan pejabat di jajaran KPKNL Palu termasuk pegawai pemerintah non pegawai negeri serta pegawai *outsourse*.

Keberhasilan tersebut diantaranya adalah:

- Dalam bidang pengelolaan kekayaan negara KPKNL Palu telah melaksanakan utilisasi kekayaan negara yang mencapai sebesar Rp3.958.747.884.803,- dari target sebesar Rp3.707.710.000.000,-. Pencapaian nilai utilisasi kekayaan negara tersebut diperoleh melalui penetapan status penggunaan barang milik Negara (BMN) dan pemanfaatan BMN, realisasi tersebut telah melewati target dan jika dipersentasekan capaiannya sebesar 106,77%;
- Penerimaan hasil pengurusan piutang negara terdiri dari Piutang Negara yang berasal dari PND 2020 dapat dicapai dengan realisasi sebesar Rp683.302.765,- dari target sebesar Rp566.857.150,98,-. Adapun target jumlah BKPN tahun 2020 sebanyak 5 berkas berhasil direalisasikan sebanyak 6 berkas, dengan demikian target persentase hasil pengurusan piutang Negara dapat direalisasikan sebesar 120%. Capaian ini diperoleh dari PSBDT maupun pelunasan hutang oleh debitur, mencapai hasil yang cukup signifikan yang merupakan dampak proses pengurusan piutang yang telah dilakukan KPKNL Palu.
- Target penerimaan pokok lelang 2020 adalah sebesar Rp44.100.000.000,- dan hanya dapat direalisasikan sebesar Rp31.096.933.345,- dengan realisasi 70,51%. Besaran realisasi yang hanya 70,51% dari target disebabkan salah satunya adalah adanya dampak dari gempa bumi, likuifaksi, dan tsunami yang melanda Kota Palu, Kab. Sigi, dan Kab. Donggala pada tanggal 28

September 2018 silam, yang mengakibatkan adanya penarikan berkas lelang dari pemohon lelang. Sedangkan untuk pencapaian implementasi *e-auction* dapat direalisasikan sebesar 416 frekuensi.

- Persentase penyerapan DIPA (non belanja pegawai) tahun 2020 yang mencapai 86,31% dari target 95% (Barang dan Modal). Capaian target belum berhasil diraih agar untuk tahun depan pelaksanaan persentase penyerapan dapat dilaksanakan dengan eksekusi yang terencana dan terorganisir dengan baik dan mengacu pada kontrak kinerja.

Dengan menganalisa IKU tersebut, maka dapat dibuat *Action Plan* yang nantinya diharapkan dapat meningkatkan pencapaian kinerja pada KPKNL Palu pada tahun berikutnya. Untuk meningkatkan jumlah frekuensi lelang pada tahun 2020, KPKNL Palu akan melakukan penggalian potensi lelang ke instansi/lembaga yang beragam dan sosialisasi serta penyebaran informasi ke masyarakat umum.

Sedangkan berkaitan dengan pengurusan piutang negara, pada tahun 2021 KPKNL Palu akan lebih mengoptimalkan penegakan hukum dalam pengurusan Piutang Negara Kementerian dan Lembaga dan Piutang Daerah. Khusus Piutang Daerah akan berkoordinasi lebih lanjut dengan Anggota PUPN Cabang yang berasal dari Unsur Pemerintah Daerah yang merupakan Inspektorat Provinsi Sulawesi Tengah.

Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) diharapkan pada tahun 2021 akan lebih ditingkatkan baik proses penilaian dan pengelolaan maupun edukasi kepada instansi pengguna layanan. Perlu sinergi dalam melakukan peran DJKN dalam pengelolaan BMN sehingga diharapkan memberi dampak bagi penerimaan Negara, dan aset Negara dapat dioptimalkan agar digunakan untuk kesejahteraan masyarakat

Kiranya Laporan Kinerja dan Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2020 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja dan pedoman yang harus diimplementasikan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Palu dalam rangka pelaksanaan tugas, pokok dan

fungsi pada periode berikutnya, sehingga di masa yang akan datang KPKNL Palu dapat semakin tampak potensinya, meningkatkan kinerjanya, dan makin dirasakan keberadaannya oleh masyarakat sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintah yang memberikan pelayanan yang profesional.

## LAMPIRAN I

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020**  
**KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PALU**  
**DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	
1.	Pengelolaan kekayaan negara yang optimal	1a-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100%
		1b-CP	Tingkat <i>outstanding</i> piutang negara	95%
		1c-N	Persentase pengukuran tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK	100%
2.	Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien	2a-CP	Indeks kepuasan pengguna layanan KPKNL	4.67 (Skala 5)
3.	Pengelolaan lelang yang optimal	3a-CP	Persentase hasil lelang (Pokok Lelang)	100%
4.	Manajemen pelayanan yang berkualitas	4a-CP	Rata-rata indeks ketepatan waktu penyelesaian layanan kekayaan negara dan lelang	87 (skala 100)
5.	Tata kelola kekayaan negara yang efektif	5a-CP	Persentase bidang tanah BMN yang disertipikatkan	100%
		5b-CP	Persentase efektivitas penyelesaian BKPN	100%
		5c-CP	Persentase nilai kekayaan negara yang diutilisasi	100%
		5d-CP	Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	100%
6	Penilaian yang berkualitas	6a-CP	Deviasi ketergunaan hasil penilaian	30%
7.	Tata kelola lelang yang efektif	7a-CP	Persentase produktivitas lelang	34%
		7b-CP	Persentase pelaksanaan lelang e-auction dan e-conventional auction	90%
8.	Edukasi yang efektif	8a-N	Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi	88
9.	Pengawasan dan pengendalian yang efektif	9a-CP	Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan aset	80%
		9b-CP	Persentase tindak lanjut penyelesaian/perbaikan atas sisa	100%

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
		aset objek penilaian kembali BMN	
10.	SDM yang kompeten	10a-N Persentase pengembangan kompetensi pegawai	100%
11.	Organisasi yang <i>fit for purpose</i>	11a-N Nilai hasil <i>review</i> pengelolaan kinerja berbasis BSC	70 (skala 100)
		11b-N Indeks efektivitas penyelenggaraan FGD Kode Etik Pegawai	80 (skala 100)
12.	Pengelolaan BMN dan keuangan yang optimal	12a-CP Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95%

Manado, 30 Januari 2020

Kepala Kantor Wilayah DJKN Sulawesi Utara Tengah Gorontalo dan Maluku Utara,

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Palu

Aloysius Yanis Dhaniarto  
NIP 196601261991031001

Devi Lesilolo  
NIP 196503031985031001

## LAMPIRAN II

ADENDUM KONTRAK KINERJA									
NOMOR: 8A/KN.28/2020									
Pada hari ini, telah disepakati adendum atas Kontrak Kinerja Nomor: 8/KN.28/2020 tanggal 31 Januari 2020, dengan rincian sebagai berikut:									
A. Perubahan Indikator Kinerja Utama dan Target									
Kode IKU	Indikator Kinerja Utama dan Target								
	Sebelum				Menjadi				
	Tingkat Outstanding Piutang Negara (Polarisasi <i>minimize</i> )				Tingkat penurunan outstanding piutang negara (Polarisasi <i>maximize</i> )				
1b-CP	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	
	99%	98%	97%	95%	0,5%	1%	2%	3%	
B. Perubahan target dan/atau <i>trajectory</i>									
Kode IKU	IKU	Sebelum				Menjadi			
		Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
1c-N	Persentase Pengukuran Tingkat kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	25%	50%	75%	100%	-	50%	75%	100%
3a-CP	Persentase hasil lelang (Pokok lelang)	10%	30%	60%	100%	10%	30%	50%	100%
5d-CP	Persentase implementasi evaluasi kinerja BMN/ portofolio aset	25%	50%	80%	100%	-	50%	80%	100%
9b-CP	Persentase tindak lanjut penyelesaian/ perbaikan atas sisa aset objek penilaian kembali BMN	10%	25%	75%	100%	5%	25%	75%	100%
Catatan:									
1. Perubahan IKU, target tahunan, dan target <i>trajectory</i> IKU mengacu pada Peraturan yang berlaku terkait Pandemi Covid-19.									
2. Adendum KK ini mulai berlaku pada triwulan I tahun 2020.									
3. Perubahan Target Nilai Kekayaan Negara yang diutilisasi pada KPKNL di lingkungan Kanwil DJKN Sulattenggalut menunjuk Nota Dinas Kepala KPKNL									

Ternate Nomor : ND-324/WKN.16/KNL.04/2020 tanggal 03 Juli 2020 perihal Permohonan Perubahan Target Nilai Kekayaan Negara yang di Utilisasi dan Nota Dinas Kepala Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara Kanwil DJKN Suluttenggomalu nomor: ND-181/WKN.16/BD.BD.02/2020 tanggal 06 Juli 2020 perihal Penyampaian usulan Perubahan Target IKU Nilai Kekayaan Negara yang diutilisasi.

Manado, 31 Agustus 2020

Menyetujui,  
Kepala Kantor Wilayah DJKN Sulawesi  
Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku  
Utara



Aloysius Yanis Dhaniarto

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan  
Negara dan Lelang Palu



Devi Lesilolo

LAMPIRAN  
 Addendum Kontrak Kinerja  
 Nomor: KA/KN.28/2020

## Perubahan manual IKU

Kode IKU	IKU	Sebelum	Menjadi
1a-CP	Persentase realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	1. PNBP Pengelolaan BMN Rp14.000.000.000,- 2. PNBP Biad PPN Rp4.200.000,- 3. PNBP Lelang Rp4.956.000.000,- Total Raw Data Target Rp18.960.200.000,-	1. PNBP Pengelolaan BMN Rp10.920.000.000,- 2. PNBP Biad PPN Rp2.000.000,- 3. PNBP Lelang Rp4.956.000.000,- Total Raw Data Target Rp15.878.000.000,-
1b-CP	Tingkat penurunan <i>outstanding</i> piutang negara	a. Nilai <i>outstanding</i> Piutang Negara Rp18.895.238.366,37 b. Proyeksi penurunan <i>outstanding</i> Piutang Negara Rp944.761.918,32 (5% dari Rp18.895.238.366,37) sehingga di akhir tahun 2020 ditargetkan Tingkat <i>Outstanding</i> Piutang Negara sebesar 95%	a. Nilai <i>outstanding</i> Piutang Negara Rp18.895.238.366,37 b. Target penurunan <i>outstanding</i> Piutang Negara Rp566.857.151 (3% dari Rp18.895.238.366,37)
1c-N	Persentase pengukuran tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK	539 NUP	419 NUP
5a-CP	Persentase Bidang tanah yang disertifikatkan	200 Bidang ( <i>raw data target</i> )	62 Bidang ( <i>raw data target</i> )
5b-CP	Persentase Efektifitas Penyelesaian BKP	15 BKP ( <i>raw data target</i> )	5 BKP ( <i>raw data target</i> )
5c-CP	Persentase nilai kekayaan negara yang diutilisasi	Rp3.707.710.000.000,- ( <i>raw data target</i> )	Rp3.016.000.000.000,- ( <i>raw data target</i> )

Kode IKU	IKU	Sebelum	Menjadi																		
9b-CP	Persentase tindak lanjut penyelesaian/perbaikan atas sisa aset objek penilaian kembali BMN	10.792 NUP	8.071 NUP																		
		<p>Formula:</p> $\frac{\text{Jumlah NUP K1 yang status LHIP selesai}}{\text{Jumlah NUP K1}} \times 100$	<p>Formula:</p> $[(\text{NUP S1} \times 10\%) + (\text{NUP S2} \times 20\%) + (\text{NUP S3} \times 30\%) + (\text{NUP S4} \times 40\%) + (\text{NUP S5} \times 60\%) + (\text{NUP S6} \times 70\%) + (\text{NUP S7} \times 80\%) + (\text{NUP S8} \times 90\%)] \times 100$ <p>Total Target NUP</p> <p>Keterangan :</p> <table border="1"> <tr><td>S1 (Status 1)</td><td>Persiapan</td></tr> <tr><td>S2 (Status 2)</td><td>Cek Fisik</td></tr> <tr><td>S3 (Status 3)</td><td>Update Data</td></tr> <tr><td>S4 (Status 4)</td><td>Kirim LHI ke KPKNL</td></tr> <tr><td>S5 (Status 5)</td><td>Penilaian Sementara</td></tr> <tr><td>S6 (Status 6)</td><td>Pengajuan LHIP ke KPKNL</td></tr> <tr><td>S7 (Status 7)</td><td>LHIP Selesai</td></tr> <tr><td>S8 (Status 8)</td><td>Pengiriman BAR</td></tr> <tr><td>S9 (Status 9)</td><td>BAR Selesai</td></tr> </table>	S1 (Status 1)	Persiapan	S2 (Status 2)	Cek Fisik	S3 (Status 3)	Update Data	S4 (Status 4)	Kirim LHI ke KPKNL	S5 (Status 5)	Penilaian Sementara	S6 (Status 6)	Pengajuan LHIP ke KPKNL	S7 (Status 7)	LHIP Selesai	S8 (Status 8)	Pengiriman BAR	S9 (Status 9)	BAR Selesai
S1 (Status 1)	Persiapan																				
S2 (Status 2)	Cek Fisik																				
S3 (Status 3)	Update Data																				
S4 (Status 4)	Kirim LHI ke KPKNL																				
S5 (Status 5)	Penilaian Sementara																				
S6 (Status 6)	Pengajuan LHIP ke KPKNL																				
S7 (Status 7)	LHIP Selesai																				
S8 (Status 8)	Pengiriman BAR																				
S9 (Status 9)	BAR Selesai																				